

# Implementasi Government Public Relations (Studi Deskriptif Kualitatif di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)

*by Gilang Handoko*

---

**Submission date:** 17-May-2024 09:18AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2381500667

**File name:** GARUDA\_Vol\_2\_no\_2\_Juni\_2024\_hal\_96-103.pdf (1.08M)

**Word count:** 2597

**Character count:** 18321

## Implementasi *Government Public Relations* (Studi Deskriptif Kualitatif di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)

Gilang Handoko<sup>1</sup>, Tria Patrianti<sup>2\*</sup>

**1** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta  
Email: [gilanghandoko18@gmail.com](mailto:gilanghandoko18@gmail.com)<sup>1</sup>, [tria.patrianti@umj.ac.id](mailto:tria.patrianti@umj.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** Lack of understanding of *Government Public Relations* function by the Education and Training Center The Ministry of Education, Research and Technology is an obstacle to the implementation in conveying information, policies, regulations and educating the public which is still not optimal. The lack of experts and limited human resources results in ineffective communication in conveying information which can cause misunderstandings and inappropriate information received by the public. This study aims to determine the activities, actions, and mechanisms of *Government Public Relations* of the Education and Training Center of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The research theory in this study is the theory of implementation and *Government Public Relations* which consists of disseminating public information, policies, regulations and educating the public about laws and regulations. This research methodology uses a qualitative approach with descriptive methods with data collection techniques are in-depth interviews. The implementation of *Government Public Relations* carried out by the public relations of the Education and Training Center of the Ministry of Education, Research Culture and Technology consists of activities such as providing accurate information, socializing the public about government policies, interacting with the public, holding press conferences, and building relationships with the media press conferences, and building relationships with the media. *Government Public Relations* actions carried out such as preparing information materials, accommodating, providing messages and aspirations of the community, by involving several stakeholders so that the information received by the public in the form of news, narratives, photos and videos is accurate and reliable. The *Government Public Relations* mechanism uses good governance, namely, equality, supervision, law enforcement, effectiveness, and responsiveness, efficiency, participation, accountability, foresight and transparency.

**Keywords:** Implementation, Public Relations, *Government Public Relations*

**Abstrak.** Kurangnya pemahaman tentang fungsi *Government Public Relations* oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi menjadi kendala dari implementasi dalam menyampaikan informasi, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik yang masih belum optimal. Kurangnya tenaga ahli dan keterbatasan sumber daya manusia mengakibatkan komunikasi menjadi tidak efektif dalam menyampaikan informasi yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan ketidaksesuaian informasi yang diterima oleh publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas, tindakan, dan mekanisme *Government Public Relations* dalam membangun citra positif Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Teori penelitian dalam penelitian ini adalah teori implementasi dan *Government Public Relations* yang terdiri dari penyebaran informasi publik, kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik mengenai perundang-undangan dan peraturan. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Implementasi *Government Public Relations* yang dilakukan humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi terdiri dari aktivitas seperti menyediakan informasi yang akurat, mensosialisasikan kepada publik tentang kebijakan pemerintah, berinteraksi dengan masyarakat, melaksanakan konferensi pers, dan membangun hubungan dengan media. Tindakan *Government Public Relations* yang dilakukan seperti menyiapkan bahan informasi, menampung, mengolah pesan dan aspirasi masyarakat, dengan melibatkan beberapa stakeholder agar informasi yang diterima masyarakat dalam bentuk berita, foto dan video akurat dan terpercaya. Mekanisme *Government Public Relations* menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu, kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, partisipasi, akuntabilitas, wawasan kedepan dan transparansi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Hubungan Masyarakat, Hubungan Masyarakat Pemerintah

## 2 1. PENDAHULUAN

Peran hubungan masyarakat (*public relations*) sebagai jembatan antar instansi pemerintah dan juga pemangku kepentingan baik *stakeholders* maupun *shareholders* memiliki peranan yang sangat strategis dan penting pada kegiatan untuk mencapai tujuan dari masing-masing instansi atau organisasi. Dalam menjalankan fungsinya hubungan masyarakat (*public relations*) merupakan penghubung antara organisasi dengan pemangku kepentingan, humas juga memiliki peranan penting dalam menjaga citra dimata publik secara luas. Humas (*public relations*) juga memiliki peran sebagai *back up management* instansi pemerintah, serta membentuk *corporate image* yang baik dimata publik. Selain menjadi penghubung antara organisasi dan pemangku kepentingan dalam aktivitas organisasi pemerintah peranan humas sangatlah krusial karena merupakan timbal balik penilaian publik terhadap instansi pemerintah. Setiap komponen yang menyangkut *image* suatu instansi pemerintah apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan masalah jangka panjang termasuk bagaimana peran humas dalam melakukan *back up management* jika ada krisis yang berdampak pada instansi pemerintah.

17  
Dalam sistem pemerintahan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat adalah aspek yang sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan masyarakat informan, partisipatif, dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk itu humas pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan publik mendapatkan pemahaman yang baik tentang kebijakan, perundang-undangan dan program yang sedang diimplementasikan. Tugas utama dari humas pemerintah juga mengedukasi publiknya dengan menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk membantu masyarakat agar dapat memahami kebijakan, tujuan dan inisiatif pemerintah.

8  
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor. 30 Tahun 2011 tentang pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Government Public Relations memiliki fungsi untuk membentuk, meningkatkan, dan juga memelihara citra dan reputasi positif lembaga dan menyediakan informasi tentang, kebijakan, program, dan kegiatan dari suatu lembaga.

7  
Sam Black juga mengatakan tugas dari *Government Public Relations* yaitu Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijakan, perencanaan, dan hasil yang dicapai dan menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan rakyat sehari-hari.

### **Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset Dan Teknologi**

saat ini sedang melakukan implementasi *Government Public Relations* dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan untuk membangun pemahaman, kepercayaan, dan dukungan publik terhadap pemerintah, kebijakan dan programnya.

Dari deskripsi diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *Government Public Relations* (Studi Deskriptif Kualitatif Di Pusat Pelatihan Dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi *Government Public Relations* yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hal ini di karenakan penelitian ini dilakukan untuk memahami subjek secara mendalam yang dimana ingin memahami mengenai fenomena atau permasalahan yang ada dalam implementasi *Government Public Relations* yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih lengkap permasalahan yang akan diteliti ( Sugiyono,2019). Dalam mencari data penelitian, penulis melakukan observasi, wawancara, dan studi literatur. Wawancara dilakukan oleh M.Rizqi Yanuananda, S.E., M.M selaku kepala divisi humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dan Edy Sofyan S.Sos, M.M selaku staff divisi humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi yang bertempat di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi secara langsung. Observasi dilakukan saat magang selama 3-4 bulan di divisi humas. Untuk menguji keabsahan data menggunakan cara triangulasi sumber melalui wawancara dengan MSE Politeknik APP Jakarta Kementrian Perindustrian yaitu Dr. Intan Maria L. Vierke.

## **3. HASIL TEMUAN DAN DISKUSI**

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam melakukan implementasi *Government Public Relations* menggunakan tiga dimensi yang diantaranya, aktivitas, mekanisme, dan tindakan.

### **Aktivitas *Government Public Relations***

Aktivitas *Government Public Relations* yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan, informasi, kebijakan, dan mengedukasi publik seperti yang disampaikan oleh M. Rizqo Yanuananda Selaku kepala Divisi humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi, sebagai berikut :

*“ Misi praktisi humas pemerintah adalah membangun citra dan reputasi positif praktisi humas pemerintah sebagai salah satu aparatur negara, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah. Untuk meniadakan tantangan sekaligus menunjang pencapaian amanah, revitalisasi, visi, dan misi dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik, Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan ini disusun dengan memperhatikan aspek prioritas kebutuhan, kepraktisan, dan praktik-praktik terbaik (best practices)”*

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam aktivitas menyampaikan informasi dan mengedukasi publik bermula pada pedoman humas pemerintah yaitu membangun citra dan reputasi positif, membentuk opini publik, menampung dan mengolah pesan serta aspirasi masyarakat, mengklarifikasi data dan informasi yang berkembang di masyarakat, serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah untuk menjawab tantangan sekaligus menunjang pencapaian amanah, revitalisasi, visi dan misi dalam rangka mewujudkan tata kelola kehumasan yang baik.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi juga menyediakan informasi yang akurat dan sosialisasi kepada publik tentang kebijakan pemerintah, mengelola media sosial resmi pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung, melaksanakan konferensi pers dan membangun hubungan dengan media massa.

Hal ini dilakukan untuk mengedukasi publik terkait penyampaian informasi kebijakan, hal ini sudah sesuai dengan yang di kemukakan oleh Effendy (2014) bahwa *Public Relations* adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran, *Public Relations* menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal”.

### **Tindakan Government Public Relations**

Bentuk tindakan yang dilakukan dalam menyebarkan informasi publik kebijakan dan mengedukasi publik yang dilakukan <sup>3</sup> Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi seperti melakukan penulisan berita pada Website resmi, bersosialisasi dengan masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang berlaku dan mengunggah foto dan video kegiatan pada media sosial. Seperti yang dikatakan oleh M. Rizqo Yanuananda selaku kepala divisi humas sebagai berikut :

*“Ada banyak hal, seperti: Penulisan berita pada laman Pusdiklat Pegawai, informasi dan foto-foto kegiatan yang terunggah di media sosial pusdiklat, pelaksanaan sosialisasi dengan masyarakat di sekitar pusdiklat, pelaksanaan sosialisasi internal pusdiklat, live streaming beberapa kegiatan penting di kanal YouTube Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek.”*

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Dr. Maria L. Vierke selaku MSE Politeknik APP Jakarta Kementrian sebagai berikut :

*“GPR memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kebijakan dan kegiatan pemerintah untuk membangun citra positif. Beberapa hal yang dilakukan oleh GPR dalam hal ini adalah: Penyediaan Siaran Pers dan Rilis Berita: GPR menggunakan siaran pers dan rilis berita untuk menyampaikan informasi terkini tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah. Menyelenggarakan Konferensi Pers: GPR dapat menyelenggarakan konferensi pers untuk memberikan kesempatan kepada media massa dan publik untuk bertanya langsung tentang kebijakan atau kegiatan pemerintah. Mengelola Akun Media Sosial: GPR menggunakan akun media sosial resmi pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat. Menyusun Materi Informasi: GPR menyusun materi informasi yang komprehensif tentang kebijakan pemerintah atau program kegiatan yang ingin disampaikan kepada publik. Materi informasi ini haruslah akurat, jelas, dan dapat dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.”*

Tindakan tersebut bertujuan untuk mengurangi pemahaman masyarakat tentang kebijakan-kebijakan yang sedang diimplementasikan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek dan masyarakat lebih mengerti tentang implementasi yang sedang dijalankan oleh Pusdiklat

Kemendikbudristek. Dan Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek agar masyarakat mengetahui segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan diharapkan memperoleh citra positif di mata masyarakat.

### **Mekanisme *Government Public Relations***

3 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi kebijakan dan mengedukasi publik pada kegiatan membangun citra positif menggunakan mekanisme 5 tata kelola pemerintahan yang baik meliputi prinsip yang diantaranya **transparansi, akuntabilitas**, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

*“mekanisme yang digunakan menggunakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik meliputi, yaitu kesetaraan, pengawasan, penganan hukum, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, partisipasi, profesionalisme, akuntabilitas, wawasan ke depan, dan transparansi.”*

Menggunakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi humas memiliki beberapa manfaat penting. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah suatu kerangka kerja yang memastikan bahwa pemerintah beroperasi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel serta responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. ketika 5 prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diterapkan dalam fungsi **Government Public Relations** dapat menghasilkan beberapa manfaat diantara lain :

- a. **Transparansi dan akuntabilitas** : pedoman tata kelola pemerintahan yang baik akan mendorong humas pemerintah untuk menyebarkan informasi tentang kebijakan dan peraturan serta mengedukasi publik secara transparan dan akuntabel dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat
- b. **Responsif terhadap kebutuhan masyarakat** : humas pemerintahan dapat menjembatani komunikasi antara pemerintahan dan masyarakat, sehingga kebijakan dan program yang dijalankan dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat
- c. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas** : dengan memiliki pedoman yang mengatur cara humas pemerintah beroperasi, proses komunikasi dan koordinasi internal dapat ditingkatkan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi

dan efektivitas kerja humas dalam menyampaikan informasi kebijakan dan peraturan serta mengedukasi publiknya

#### 4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yaitu penulis mengemukakan bahwa, 1. Aktivitas Government Public Relations yang dilakukan humas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi adalah menyampaikan informasi kebijakan, peraturan dan mengedukasi publik dengan cara mengolah pesan, aspirasi masyarakat, membentuk opini publik serta mensosialisasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat berbentuk press release atau artikel mengenai kebijakan dan prestasi yang telah dicapai oleh Pusdiklat Kemendikbudristek dan membuat konten berupa foto atau audio yang menjelaskan kebijakan atau menyampaikan pesan-pesan penting melalui kegiatan berinteraksi langsung dengan masyarakat melalui media sosial resmi.

Tindakan Government Public Relations yang dilakukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam kegiatan menyebarkan informasi, kebijakan dan peraturan serta mengedukasi publik dengan memberikan penulisan berita serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan internal Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Informasi yang diberikan berbentuk berita, narasi, foto dan audio melalui media informasi seperti media sosial dan warta online.

Mekanisme Government Public Relations yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi dalam menyebarkan informasi publik, kebijakan, dan peraturan serta mengedukasi publik menggunakan pedoman dari tata kelola pemerintahan yang baik terdiri dari prinsip yaitu, kesetaraan, pengawasan, penegakan hukum, daya tanggap, efektivitas, efisiensi, partisipasi, akuntabilitas, wawasan kedepan, dan transparansi. Dengan menggunakan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik memastikan humas melakukan implementasi Government Public Relations secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya. Hal ini mendorong humas untuk memberikan informasi secara akurat, jujur, serta transparan dan mudah diakses oleh publik yang dapat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Menggunakan mekanisme tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat menjembatani



## **1** **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing utama, yaitu Dr. Tria Patrianti, M.I.Kom lalu kepada narasumber penelitian yang sudah meluangkan waktunya, orang tua saya, sahabat, serta semua pihak yang sudah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

- Ardianto, E. (2018). *Handbook Of Public Relations*. Bandung: Remaja Rosadakarya Bandung.
- Black, Sam, Ardaneshwari, Sharpe, & Melvin L. (2010). *Ilmu Hubungan Masyarakat : Praktis Practical Public Relations Common Sense and Professional People*. Makassar: Dian Rakyat.
- Danandjaja. (2011). *Peran Humas Dalam Perusahaan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Effendy, O. U. (2011). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Prakteknya*, Bandung : Remaja Rosdakarya. H. A. W. Widjaja.2002. Bandung: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiawan, Guntur. (2012). *Implementasi Birokrasi Pembangunan*. Bandung : Remaja Rosadakarya Offset.
- Scot, C. M. (2006). *Effective Public Relations*. Jakarta: Perason Education INC Kencana Perenada Media Group.
- Suhandang, Kustadi. (2012). *Studi dan Penerapan Public Relations : Pedoman Kerja Perusahaan*. Bandung : Nuasa Cendekia
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA
- Yosal, I.(2019). *Media Relations: Konsep, Pendekatan, dan Praktik*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media

# Implementasi Government Public Relations (Studi Deskriptif Kualitatif di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 [journal.widyakarya.ac.id](http://journal.widyakarya.ac.id) 5%  
Internet Source

2 [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id) 5%  
Internet Source

3 [kepegawaian.untan.ac.id](http://kepegawaian.untan.ac.id) 4%  
Internet Source

4 [fia.ui.ac.id](http://fia.ui.ac.id) 2%  
Internet Source

5 [perpus.menpan.go.id](http://perpus.menpan.go.id) 1%  
Internet Source

6 Submitted to Academic Library Consortium 1%  
Student Paper

7 [repository.uinjkt.ac.id](http://repository.uinjkt.ac.id) 1%  
Internet Source

8 [repositori.umrah.ac.id](http://repositori.umrah.ac.id) 1%  
Internet Source

[ejournal.uinib.ac.id](http://ejournal.uinib.ac.id)

9	Internet Source	1 %
10	kc.umn.ac.id Internet Source	1 %
11	mafiadoc.com Internet Source	1 %
12	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
13	akademik.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
14	depot.umc.edu.dz Internet Source	<1 %
15	ejournal.iaidalwa.ac.id Internet Source	<1 %
16	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
17	issuu.com Internet Source	<1 %
18	theses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
19	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On